

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa reformasi Indonesia mengalami proses demokrasi, Indonesia mengalami masa-masa pengekangan terutama dalam politik di karenakan kekuasaan yang otoriter dari Soeharto selama 35 tahun. Era reformasi dimulai dari tahun 1998 tokoh Amin Rais mendorong reformasi politik demokratis. Reformasi ini munculnya banyak partai baru. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika dalam setiap kehidupan politik. Di antara perubahan yang akan terjadi yakni seperti kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan membentuk partai politik. Pada awal reformasi jumlah partai politik yang didirikan mencapai 184 partai, dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah ini yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Pada saat Pemilu 2004, jumlah partai politik bertambah banyak hingga mencapai 200 partai politik yang sudah terbentuk. Dari jumlah partai politik sebanyak itu, hanya 50 partai politik yang sudah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan hanya 24 partai politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 (Romli, 2011). Adapun tiga alasan munculnya optimisme yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggungjawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3) Perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa.

Namun, dibalik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar mempunyai kesungguhan untuk menjatuhkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang memiliki sifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai (Aspinall et al., 2000). Menurut Suharso dalam jurnal (Purnaweni, 2004) menjelaskan tentang paradoks demokrasi yang patut dikritisi. *Pertama*, berkembang kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekocokan masa yang sering dilanjutkan dengan adu fisik masal secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku penyimpangan lainnya. Hal ini menunjukkan sebuah perilaku anti demokrasi. Politik *zero sum game*¹ yaitu upaya penenggelaman lawan politik menjadi sebuah praktek lazim yang menumbuhkan rasa takut pada lawan politik yang berbeda tujuan. Hal ini membuat masyarakat takut untuk menjadi kritis. *Kedua*, munculnya konspirasi politik dari mereka yang dulu anti demokrasi tetapi mengutarakan semangat saat ajang pemilu untuk meraih kemenangan tanpa menunjukkan komitmen dalam mengagendakan demokrasi. *Ketiga*, demokrasi hanya sekedar retorika politik dibanding sebagai agenda politik memberikan kesan bahwa demokrasi bukan sebagai idealism dan agenda yang harus diperjuangkan, tetapi hanya sebagai alat dan isu untuk meraih bangku kekuasaan. *Keempat*, ketika simbol kultus individu diimplementasikan oleh rezim Soeharto dihujat keras dan ingin dihapuskan secara

¹ Politik *zero sum game* yaitu pertamakali dipublikasikan dalam buku “*Theory of Games and Economic Behavior*” pada tahun 1944 oleh John Von Neumann dan Oscar Morgenstern.

paksa, kini sebagian elite politik malahan membangunkan kembali simbol simbol figur pemimpin yang membawa kultus individu yang dikemas dalam bentuk lain, seakan bahwa kultus individu dianggap sebagai politik yang tepat memimpin bangsa. Implikasi pemilu pada sistem proposional, pertama yaitu penerapan sistem legislator terbuka yang dicantumkan pada UU No. 12 Tahun 2003 dan diaplikasikan pada pemilu 2004 ternyata tidak berhasil meningkatkan legislator dengan masyarakat yang diwakilinya padahal UU tersebut merupakan koreksi dari UU No. 3 Tahun 1999 yang dinilai sistem pemilunya belum menghasilkan wakil rakyat yang benar benar cakap. Upaya membangun otoritas yang sentralistik dengan mobilisasi simbol simbol karisma politik dalam rangka memberikan kesan bahwa telah bangkitnya pemimpin baru yang layak untuk Indonesia kedepannya. Meskipun simbol tersebut tidak nyata atau semu yang terpenting pesona yang ditawarkan adalah buah manis dari sebuah komoditas politik (Aspinall et al., 2000).

Indonesia menganut sistem demokrasi yang dimana rakyat berdaulat atas segalanya salah satunya dalam menentukan wakilnya di sebuah parlemen dan pemimpinnya. Dalam aktivitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Perhelatan pesta rakyat berupa pemilihan umum merupakan sebuah bentuk sarana dan wadah pengekspresian kebebasan menentukan pilihannya yang dimana orang-orang yang mencalonkan di pilih sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas untuk menyuarakan serta mendengar rakyat. Terciptanya pemilu yang demokratis akan menciptakan sebuah ekosistem politik sehingga hasil dari mekanisme yang baik tersebut menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Pada masa pemerintahannya BJ, Habibie pemilu yang semula diagendakan tahun 2002

dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999 yang disebut dengan periode reformasi dimana periode tersebut merupakan periode pemilu paling demokratis yang dimana banyak lahirnya partai baru hingga terdapat 48 partai. Pentingnya, perhatian pada aspek legal-formal seperti yang sudah disebutkan diatas sangat penting karena merupakan aturan main yang harus dihormati serta dipatuhi oleh pemerintah, Lembaga parlemen, Lembaga yudikatif, penyelenggara pemilu, para kontestan pemilu, pengawas pemilu hingga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pelaksanaan pemilu juga harus diatur secara komprehensif. *Pertama*, persyaratan untuk mendaftar sebagai pemilih, dengan klasifikasi tertentu. *Kedua*, membuat persyaratan serta pembatasan atas pencalonan. *Ketiga*, mengatur pembagian kursi yang sesuai dengan perolehan suara. *Keempat*, persyaratan tentang masa jabatan. *Kelima*, cara cara pengisian kekosongan jabatan. *Keenam*, pencabutan mandat. *Ketujuh*, kerahasiaan pemungutan suara lalu yang terakhir, penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan asas langsung yakni memiliki makna bahwa rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan hak suaranya sesuai dengan nuraninya tanpa adanya paksaan dan perantara, umum, bebas dan rahasia (Fogg, 2002).

Ada 4 fakta ketidakmampuan sistem proposional dalam mendekatkan relasi antara wakil rakyat dengan konstituen². *Pertama*, akuntabilitas wakil terhadap konstituen cenderung lemah, hal ini didasari oleh akuntabilitas dan loyalitas wakil rakyat yang berfokus pada partai politiknya saja tetapi merupakan masyarakat yang memilihnya. *Kedua*, sistem proposional terbuka yang mana anggota legislatif

² Kacung Marijan, Perwakilan Politik, Antara angka dan Relasi, Kompas, 13 Juni 2006.

cenderung menghasilkan wakil rakyat bertindak tidak sesuai dengan janji program yang diutarakan tetapi bertindak sesuai dengan program partai asal. *Ketiga*, wakil rakyat yang tidak dekat dengan rakyatnya sendiri didasari oleh yang menawarkan wakil rakyat untuk dipilih adalah partai atau yang sesuai kehendak partai bukan rakyat secara langsung sehingga legislator cenderung mendengar perintah pimpinan partai disbanding mendengar suara rakyat. *Keempat*, wakil rakyat sering kali bertindak berdasarkan kemauanya sendiri dan berdasarkan situasi yang berkembang tanpa memperdulikan rakyat.

Kampanye adalah sebuah doktrin yang bertujuan mendapatkan dukungan untuk kampanye dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mencapai suatu proses pengambilan keputusan didalam suatu kelompok (Pudjiastuti, 2017). Kampanye yang dilakukan oleh calon presiden 2024 yakni Ganjar, Prabowo, Anies dan Puan yang mempertahankan basis pendukung seperti para petani dan jemaah NU, blusukan ke desa desa untuk menjalin silaturahmi, koordinasi yang baik antara tim sukses dengan tim sukses dan pasangan *incumbent* dengan tim sukses dan membangun rasa kekeluargaan melalui strategi persoalan ini tidak akan lepas dari keinginannya untuk bisa mengetahui secara langsung keluhan masyarakat, serta lebih dekat dan mengenal masyarakat, sosialisasi secara langsung program kerja visi misi.

Menurut Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO)³ menjelaskan hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya, Anies Baswedan berada di

³ Diakses <https://news.detik.com/pemilu/d-6614110/elektabilitas-para-bakal-capres-di-6-survei-terkini/2>

urutan teratas, disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Survei tersebut dilakukan pada 1-7 Maret 2023 dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.200. Dalam metode ini mempunyai pengukuran kesalahan (*margin of error*) 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting dalam pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat. Adapun nama-nama yang selanjutnya dikerucutkan menjadi 5 nama tertutup dengan hasil yakni sebagai berikut; (1) Anies Baswedan 32,6%; (2) Ganjar Pranowo 26,8%; (3) Prabowo Subianto 25,1%; (4) Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%; (5) Puan Maharani 3,9%.

Menurut hasil wawancara pra penelitian⁴ di Kabupaten Tangerang yang diketuai oleh Irvansyah Asmat bahwasanya, untuk jumlah baliho di Kabupaten Tangerang beberapa daerah sudah dipasang yaitu daerah Pasar Kemis, Teluk Naga, Kelapa Dua, Legok dan Curug. Menurut keterangan Beliau baliho yang tersebar kurang lebih sekitar 30 Unit yang besar dan untuk spanduk kecil memang diharuskan memasang baliho berwajah Puan Maharani. PDIP mendapatkan suara terbanyak di Kabupaten Tangerang dengan mendapatkan jumlah kursi 8 di DPRD Kabupaten Tangerang karena hal demikian, PDIP mampu menduduki jabatan ketua DPRD yaitu Khalid Ismail. Berikut data perolehan suara 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Untuk dana yang dikeluarkan PDIP sendiri khusus daerah Kabupaten Tangerang dari DPC kurang mengetahui karena pemasangan baliho itu sendiri tidak diserahkan kepada DPC namun diwajibkan kepada anggota Fraksi PDIP, jika partai yang membuat, akan terjadi kesinggungan di dalamnya karena banyak anggota

⁴ Wawancara bersama Doni selaku staff DPC PDIP.

PDIP yang mempunyai Elektabilitas tinggi seperti, Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini sehingga untuk pemasangan baliho Puan Maharani diwajibkan kepada anggota Fraksi. Kemudian, selain penggunaan Baliho sebagai strategi PDIP dalam menaikkan Elektabilitas, selama bulan Ramadhan PDIP juga membagikan nasi box setiap hari selama Ramadhan berjumlah 200 box, membantu masyarakat yang belum mempunyai BPJS tanpa dipungut biaya, penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan Covid-19, menyelenggarakan Vaksinasi gratis di kantor DPC PDIP Kabupaten Tangerang. Untuk penggunaan Baliho menurut beliau untuk daerah Kabupaten Tangerang efektivitasnya adalah 50:50 karena penggunaan baliho dan pelaksanaan kegiatan lainnya efektif di beberapa wilayah tetapi untuk di wilayah lainya kurang begitu efektif contoh yang kurang efektif yaitu daerah Kresek, Gunung Kaler dan Kronjo karena wilayah tersebut masih dibawah garis kemiskinan meskipun memasang baliho Puan Maharani dan bakti sosial tidak akan efektif jika tidak memberikan sejumlah uang.

Dalam survey yang di lakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denney JA, PDIP merupakan partai terbesar di Indonesia hal ini di spesifikasikan dengan 10% Dukungan hal ini menjadikan PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia karna berhasil mendapat dukungan 22,7%. Sedangkan partai lain Golkar mendapat 13,8% dan di posisi buntut sebagai partai besar adalah Gerindra dengan 11,2% dukungan⁵.

Adapun hasil pemilihan umum yang berada di Kabupaten Tangerang dari tahun 2004 - 2019 sebagai tolak ukur untuk Pemilihan umum 2024 yakni;

⁵ Diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/08/ini-partai-politik-terbesar-di-indonesia-awal-2023-menurut-survei-lsi>

Tabel 1.1
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	273.913	8
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	237.948	7
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	218.179	8
4	Partai Demokrat	155.122	5
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	123.705	6

Sumber: Data KPU Kabupaten Tangerang Selatan.

Tabel 1.2
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009-2014

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat	173.676	8
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	130.320	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	129.273	4
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	81.793	4
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	64.755	1

Sumber: Data KPU Kabupaten Tangerang Selatan.

Tabel 1.3
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	223.192	7
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	217.575	7
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	151.332	6
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	129.379	5
5	Partai Demokrat	117.733	6

Sumber: Data KPU Kabupaten Tangerang Selatan.

Tabel 1.4
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	74.454	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	64.648	8
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	55.805	7
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	40.370	6
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35.062	4

Sumber: Data KPU Kabupaten Tangerang Selatan.

Kesimpulan yang bisa di ambil dari penyajian tabel diatas bahwa peta kekuatan politik PDIP di Kabupaten Tangerang sangat kuat hal ini karna sumber daya yang di miliki PDIP sangat kuat karena PDIP sendiri merupakan partai yang besar dan selalu masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Tapi apakah partai mampu memberikan efek derterminan terhadap calon eksekutif yang di calonkan partai dalam hal ini Puan Maharani sebagai sosok yang di gadang-gadang sebagai calon presiden di pemilu 2024.

Berangkat dari sebuah pertanyaan-pertanyaan bagaimana suara Puan dapat berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat Kabupaten Tangerang. Penulis ingin melakukan penelitian bagaimana implementasi penggunaan baliho dapat memberikan efek terhadap pendongkrakan elektabilitas dan popularitas Puan Maharani di Kabupaten Tangerang serta apakah baliho mampu memberikan edukasi politik masyarakat Kabupaten Tangerang untuk tergerak memberikan suaranya di pemilu tahun 2024. Peneliti akan menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu memberilan kuesioner ke masyarakat Kabupaten Tangerang dengan sample acak dan memiliki spesifikasi tertentu agar sesuai dengan tujuan

penelitian ini yang berjudul **“PENGARUH IMAGE POLITIK PUAN MAHARANI DENGAN PENGGUNAAN BALIHO TERHADAP PILIHAN POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah baliho Puan Maharani dapat menaikkan elektabilitas dan popularitas serta mempengaruhi pilihan politik Masyarakat kabupaten Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemasangan baliho terhadap popularitas Puan Maharani.
2. Untuk mengetahui Elektabilitas Puan Maharani dikalangan masyarakat Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui kredibilitas Puan Maharani dalam mencitrakan diri dengan menggunakan baliho sebagai alat image politik dalam melakukan kampanye.
4. Untuk mengetahui pilihan politik pada masyarakat Kabupaten Tangerang.

1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada respon penggunaan baliho yang dilakukan oleh Puan Maharani tentang pencalonan presiden 2024. Pengambilan sampel penelitian dengan memfokuskan daerah Kabupaten Tangerang karena

sudah terlihat banyak baliho yang terpampang jelas di fasilitas umum seperti jalan raya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tersebut terdapat dua manfaat penelitian yang terdiri dari, manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Politik dan ikut membantu memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang politik. Utamanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi khususnya tentang strategi kampanye melalui baliho.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut yang menyangkut soal pengaruh baliho terhadap pilihan politik masyarakat. Sehingga penggunaan baliho sebagai media kampanye dapat dimaksimalkan sehingga dapat menarik simpati masyarakat dan di sisi lain bisa dapat memahami lebih lanjut efektifitas penggunaan baliho sebagai media kampanye.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Jurusan Ilmu Politik

Sebagai kajian ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik yang berkaitan dengan marketing politik yaitu strategi kampanye melalui baliho.

b. Bagi Kandidat

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum, terutama yang berkaitan dengan strategi kampanye dan efektifitas penggunaan baliho.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis untuk melakukan penelitian agar penelitian ini dapat memperkaya referensi yang digunakan dalam menelaah teori teori yang bertujuan untuk memperkuat penelitian ini beberapa penelitian baik dari jurnal maupun dari skripsi terdahulu sebagai acuan dalam menulis memperkaya bahan kajian dalam membuat penelitian. Berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi.

1. Christine Purnamasari Andu dan Sartika Dwi Hardiyanti

Penelitian pertama dilakukan oleh Christine Purnamasari Andu dan Sartika Dwi Hardiyanti dengan judul “Pengaruh Baliho Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Kelas Menengah Pada Pilkada Di Kota Makassar”. Riset tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun lokasi dalam riset tersebut yang dilakukan di Kota Makassar, serta menggunakan sumber ataupun jenis data yang dibutuhkan yakni data primer ataupun data sekunder. Informan dalam rise ini yang

berjumlah dua belas orang. Dengan data tersebut yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara terhadap kedua belas informan setelah dianalisis membutuhkan berbagai macam teori. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwasanya riset tersebut membahas tentang efek baliho bagi pemilu di kota Makassar menurut data yang dikumpulkan dari wawancara bahwasanya pilihan politik dari kelas menengah tidak hanya bergantung dari pemasangan baliho karena 50% informan mengatakan bahwasanya pilihan politiknya berdasarkan sejarah para kandidat berupa prestasi ataupun kemampuan dapat dihasilkan oleh kandidat tersebut. Dan juga informan mengindikasikan bahwasanya lebih baik kandidat yang akan maju untuk terjun langsung melakukan sosialisasi dari pada hanya memasang baliho di fasilitas umum agar terciptanya komunikasi dua arah sehingga satu sama lain saling kenal lalu informan juga mengindikasikan untuk mempromosikan kandidat dengan menggunakan media sosial dan televisi. Serta respon yang dihasilkan oleh informan bahwasanya pemasangan baliho hanya membuat kotor, mengganggu dan tidak tertata rapi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti bahas ialah sama sama membahas tentang penggunaan baliho untuk dijadikan pilihan politik ditengah masyarakat dan untuk perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti bahas ialah letak target penelitiannya, bahwasanya penelitian terdahulu memakai masyarakat kelas menengah di daerah Makassar sedangkan peneliti menggunakan target untuk mendapatkan sampel penelitian adalah masyarakat di daerah Kabupaten Tangerang.

2. Regina Yulandari dan Zainal Abidin

Penelitian kedua dilakukan oleh Regina Yulandari dan Zainal Abidin dengan judul “Pengaruh Iklan Politik Baliho Sebagai Bagian Dari Strategi Kampanye T. Irwan Djohan Pada Pemilu Legislatif Di Kota Banda Aceh Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya pengaruh iklan politik baliho merupakan strategi untuk melakukan kampanye T.Irwan Djohan pada pemilihan legislatif di kota Banda Aceh 2014 bahwasanya baliho memberikan pengaruh yang sangat efektif terhadap masyarakat karena dari pemasangan baliho tersebut T.Irwan Djohan dapat memenangkan pileg 2014 karena pendekatan yang dilakukan oleh T. Irwan Djohan melalui kampanye dengan sangat baik sehingga dapat memenangkan hati masyarakat. Kemudian T. Irwan Djohan juga mempunyai rekam jejak yang baik di masa lalunya. Dan juga T. Irwan Djohan menyampaikan pesan politiknya melalui pendekatan iklan politik yaitu balihonya sehingga dapat menarik simpati masyarakat yang dinilai sangat bagus dan terkesan tidak memaksa.

Persamaan penulis membahas tentang penggunaan baliho untuk dijadikan pilihan politik ditengah masyarakat.dan untuk perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti bahas ialah penelitian terdahulu memfokuskan pada pengaruh iklan baliho untuk strategi kampanye salah satu kandidat di pemilu kota Banda Aceh sedangkan di penelitian ini fokus penelitian adalah mengetahui

pengaruh penggunaan baliho di era digitalisasi dan letak target sampel penelitian berada di daerah Kabupaten Tangerang.

3. Neneng Yani Yuningsih dan Leo Agustino

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sutrisno, Neneng Yani Yuningsih dan Leo Agustino dengan judul “Komparasi Teori Marketing Politik 4P Menurut Niffeneger dan 3P Menurut Adman Nursal”. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Yang pertama yaitu marketing politik yang menggunakan teori strategi pendekatan pasar (Nursal, 2004) yang dikenal dengan istilah 3P yaitu Pull Marketing, Push marketing, dan Pass marketing. Kemudian yang kedua yaitu marketing politik yang menggunakan teori bauran marketing atau marketing-mix (Niffeneger 1989) atau 4P yaitu product, promotion, price dan place.

Penerapan marketing politik di dalam strategi penggunaan media massa dengan medium baliho. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang 2 teori yang di komparasi sedangkan penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mengetahui apakah penggunaan baliho masih relevan dan apakah penggunaan baliho dapat menarik simpati masyarakat Kabupaten Tangerang di saat sudah memasuki era internet.